

Dari Ekonomi ke Ekonomi Politik

by Nanang wahyudin1

Submission date: 04-Apr-2022 06:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1797345692

File name: Dari_Ekonomi_ke_Ekonomi_Politik.pdf (345.8K)

Word count: 6107

Character count: 40232

DARI EKONOMI KE EKONOMI POLITIK: TRANSFORMASI SETENGAH HATI SEKTOR EKOWISATA DI BANGKA BELITUNG

Ibrahim Ibrahim¹, Nizwan Zukhri² dan Rendy Rendy¹

^{1,3}Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

²Jurusan Manajemen, Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia

E-mail: iim_babel@yahoo.com

ABSTRAK. Bangka Belitung adalah daerah yang sedang mencoba beralih dari sektor utama perkebunan dan pertambangan ke sektor pariwisata. Pemerintah daerah dan berbagai komunitas setempat sedang aktif mendorong peningkatan ekonomi alternatif ini menjadi sebuah sumber pendapatan baru. Pertanyaan kritis terkait bagaimana sejatinya dimensi ekonomi dari perspektif para pelaku bisnis pariwisata dan intervensi pemerintah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Studi ini fokus pada alasan para pelaku wisata terlibat, khususnya pedagang dan pengelola kawasan wisata, serta mencermati bagaimana dimensi ekonomi politik dalam pengambilan keputusan politik untuk pengembangan ekowisata diperankan oleh pemerintah daerah. Melalui studi kualitatif deskriptif, studi ini menemukan bahwa para pedagang dan pengelola ekowisata memandang adanya prospek yang cerah dalam industri pariwisata. Secara umum pemerintah daerah belum optimal memainkan peran dalam fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisator. Dari tiga aspek tersebut, pemerintah daerah kurang optimal dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana serta perijinan kawasan, baru optimal dalam memberikan dukungan pengembangan kapasitas. Pengembangan ekowisata masih dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang basisnya secara umum adalah inisiatif komunitas, dan belum ditempatkan sebagai aktivitas dimana pengambilan keputusan politik dianggap menentukan arah pengembangan ekowisata ke masa yang akan datang.

Kata Kunci: ekonomi; ekonomi politik; transformasi, ekowisata

ABSTRACT. Bangka Belitung were an area that is moving shifted from the main plantation and mining sectors to the tourism sector. The local government and various local communities are actively encouraging the improvement of this alternative economy to become a new source of income. Critical questions related to what is the true economic dimension from the perspective of tourism business actors and government intervention are very interesting to be elaborated. This study focuses on what the reasons of tourism actors are involved, particularly small enterprises and managers of tourist areas, and examines how the political economy dimension in making political decisions in ecotourism development regulated by local governments. Applying a descriptive qualitative study, this study found that ecotourism traders and managers see a bright prospects in the tourism industry development. As a result, local governments have not enhanced an optimal role the function as motivator, facilitator and dynamisator. Belonging three aspects, local governments are less than optimal in providing support for facilities and infrastructure as well as area permits, only optimal in providing capacity building support. Ecotourism development is still seen as an economic activity whose basis is generally community initiative, and has not been positioned as an activity where political decision making is considered to determine the direction of ecotourism development into the future.

Keywords: economy; political economy; transformation; ecotourism.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Babel (Bangka Belitung) adalah sebuah daerah yang pada dasarnya bercorak agraria perkebunan dengan variasi produksi di sektor kelautan dan penambangan (Sulista, et.al., 2019; Ibrahim, et.al, 2018; Sujitno, 2015). Meskipun mesti diakui sektor pertambangan memegang peran kunci dalam mata rantai pertumbuhan ekonomi di daerah ini, namun sesungguhnya sektor tambang berkembang karena perubahan sebagai konsekuensi regulasi oleh pusat

dua puluh tahun belakangan (Ibrahim, 2015; Haryadi, 2015; Susilo dan Maemunah, 2009). Jauh sebelum penambangan timah massif berkembang sebagai sektor ekonomi, perkebunan merupakan sektor utama mata pencaharian masyarakat di daerah ini. Komoditas lada dan karet telah menjadikan Bangka Belitung sebagai daerah yang dikenal sebagai pusat rempah si lada putih dan karet dengan lateks berkualitas tinggi. Manakala tambang inkonvensional segera merubah wajah daerah ini menjadi kawasan ekstraktif, perubahan pekerjaan masyarakat pun mengalami perubahan signifikan (Erman, 2010).

Berlangsung selama lebih dua puluh tahun, euforia sektor pertambangan perlahan meredup seiring dengan pengetatan regulasi, berkurangnya cadangan komoditas, dan menguatnya kesadaran akan degradasi lingkungan. Pada saat yang nyaris bersamaan, pertumbuhan sektor pariwisata yang ditopang oleh penetrasi dan distribusi media sosial dalam promosi dan diseminasi obyek-obyek wisata baru mendorong geliat sektor pariwisata ke tampilan dan arah yang baru (Ibrahim, et.al, 2019a; Wahyudin, 2019; Wardhani, 2016). Sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi daerah ini untuk menempatkan sektor pariwisata sebagai alternatif baru karena selain memang kaya akan potensi pariwisata terpendam, letak geografis daerah yang tidak berjarak terlalu jauh dengan Jakarta atau episentrum ekonomi lainnya, serta didukung oleh keinginan untuk lepas dari ketergantungan pada sektor pertambangan, dunia pariwisata menunjukkan gejala baru yang positif.

Kondisi ini selaras dengan publikasi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa kinerja sektor pariwisata yang makin meningkat berpotensi untuk memperkuat struktur ekonomi dan mendukung percepatan transformasi ekonomi. Di tengah kontraksi ekspor berbagai komoditas utama, pada 2019 perolehan devisa pariwisata yang terdiri *travel* dan transportasi mencapai 18,4 miliar dolar AS. Angka ini menjadi sumber devisa tertinggi kedua setelah batubara dan meningkat secara konsisten dengan surplus neraca yang terjaga dalam lima tahun terakhir, dengan nilai rata-rata per tahun mencapai 14,5 miliar dolar AS. Pangsa devisa pariwisata juga merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan ekspor jasa lainnya (Bank Indonesia, 2020:81).

Tidak mengherankan jika di berbagai tempat di kawasan ini ditemukan banyak spot pariwisata baru, baik yang muncul karena inisiasi dari komunitas maupun yang muncul karena dorongan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sedang giat-giatnya menggarap sektor pariwisata dan ekowisata adalah pilihan yang umumnya dikembangkan (Ibrahim, et.al., 2019b). Pantai, air terjun, bekas kolong, kawasan mangrove, dan beberapa spot wisata alam menjadi bidikan yang dirasa menjadi magnet baru bagi pengembangan industri pariwisata di daerah ini. Pertanyaan penting dan kritis dari fenomena ini kemudian adalah terkait bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan satu

iklim yang ramah bagi masyarakat lokal, sekurang-kurangnya terkait aspek-aspek desain kebijakan dan dukungan sarana dan prasarana bagi pengembangan tersebut.

Untuk peningkatan daya saing kinerja sektor pariwisata, Pemerintah sesungguhnya telah mengambil kebijakan 3A2P yang merupakan entitas dari strategi penguatan pada penyediaan Akses, Atraksi, dan Amenitas serta pengembangan kapasitas promosi dan pelaku pariwisata. Strategi dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas bandar udara, penguatan *branding* dan *story* destinasi, dan pengembangan jaringan hotel internasional. Bagi sasaran pelaku, transformasi ditempuh melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Adapun transformasi pada aspek promosi ditempuh melalui promosi intensif melalui media digital, *online travel agent*, dan perluasan *hotdeals*. Sinergi antarpemangku kebijakan turut mendukung transformasi melalui koordinasi dan penyelesaian leher botol pengembangan pariwisata. (Bank Indonesia, 2020:83)

Menurut Pitana dan Gayatri (2005:95), pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya paling minimal sebagai: *pertama*, peran Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. *Kedua*, peran Fasilitator. Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pariwisata provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai pemegang konsen utama pembangunan pariwisata hendaknya berperan optimal dalam menyediakan berbagai fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non fisik. *Ketiga*, peran sebagai Dinamisator, dalam pilar *Good Governance*, agar dapat dicapai pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran utama untuk mensinergikan antar ketiga pihak tersebut, agar tercipta suatu

simbiosis mutualisme demi perkembangan dan pembangunan pariwisata.

Studi ini menganggap penting untuk melihat bagaimana sebenarnya transformasi ekonomi di Bangka Belitung ini berjalan dengan melihat sekurang-kurangnya pada obsesi perubahan mata pencaharian dan bentuk keterlibatan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas industri pariwisata di tingkat lokal. Pada akhirnya, kajian ini mendorong kita untuk memandang studi ini dari perspektif ekonomi politik, yakni sebuah cara pandang yang melihat bahwa ekonomi sesungguhnya sangat ditentukan oleh konteks politik. Konteks politik dalam hal ini akan terkoneksi dengan kebijakan yang didesain secara khusus untuk mendorong keberhasilan target pemerintah di sektor pariwisata.

Studi terhadap transformasi ekonomi daerah yang fokus pada pengembangan sektor pariwisata pernah dilakukan oleh Simamora dan Sinaga (2016). Riset yang mencermati peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata alam dan wisata budaya di Kabupaten Tapanuli Utara ini menemukan bahwa pemda lebih berperan sebagai fasilitator dibandingkan sebagai motivator dan dinamisator. Peran ini diwujudkan dalam bentuk penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat pengembang obyek wisata, promosi obyek wisata, serta fasilitas khusus bagi investor pariwisata.

Studi Djuyandi (2020) menjelaskan peran pemerintah terkait transformasi desa wisata dari perspektif sikap politik dalam konteks prioritas pembangunan yang sangat lemah. Ia menjelaskan bahwa fenomena kebangkitan atau pertumbuhan entrepreneurship yang positif masyarakat di Desa Jatimukti ternyata tidak diimbangi dukungan yang besar dari pemerintah desa. Faktor penyebab utamanya adalah terkait restrukturisasi desa sehingga prioritas program pemerintah desa belum dapat dijalankan optimal. Ditambah lagi paradigma masyarakat desa yang belum dapat beririsan dengan baik dengan tantangan perubahan.

Sedangkan untuk menjelaskan gambaran transformasi daerah atau desa yang bertumpu pada sektor wisata kajian Junaedi (2014) yang menemukan bahwa transformasi sosial dan ekonomi yang berlangsung secara simultan di Desa Wisata Blimbingsari, Kabupaten Jembrana,

Bali dapat dijadikan model sukses transformasi. Di kawasan ini berlangsung proses pergeseran aktivitas ekonomi dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang dikenal sebagai transformasi struktural. Pendapat Chenery (2007) sebagaimana dikutip Junaedi mengasumsikan bahwa setiap daerah dalam jangka panjang akan mengandalkan sektor manufaktur, termasuk infrastruktur pariwisata dalam konteks ini, yang lebih menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dibandingkan dengan sektor pertanian yang mempunyai nilai tukar lebih rendah, ataupun sektor pertambangan timah yang *unsustainable* dan *bubble economic*.

Riset ini sendiri menemukan bahwa pembangunan pariwisata sebagai sektor alternatif tumpuan masa depan Bangka Belitung pasca tambang, masih sebatas jualan politis para pengambil kebijakan. Sementara pertumbuhan obyek wisata terutama yang berbasis ekoturisme atas inisiatif masyarakat maupun individu justru berkembang pesat dan sporadis. Pemerintah daerah bukannya tidak mengambil konsen pada fenomena ini. Namun terdapat gejala disinkronisasi antara harapan dan program yang lebih ideal. Studi diskrepansi menemukan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan pariwisata Bangka Belitung masih bersifat topdown dan teknokratis, sementara kebutuhan aktor pengembang obyek wisata lebih membutuhkan fasilitasi yang lebih fokus kepada infrastruktur dan upaya kreatif baik terkait konten, promosi, maupun diseminasi pengembangan ekoturisme di Bangka Belitung.

METODE

Tulisan ini diperoleh dari studi yang bercorak kualitatif deskriptif. Studi kualitatif menekankan unsur kedalaman data dan abstraksi atas data yang ditemukan. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang terdiri atas pengelola kawasan wisata, pedagang di sekitar kawasan wisata, dan unsur pemerintah kabupaten/kota yang membidangi sektor pariwisata. Informan tersebar di kawasan wisata yang ada 6 kabupaten dan 1 kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik penentuan informan dilakukan dengan mekanisme *purposive*, yakni berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun kriterianya adalah para pedagang di

sekitar kawasan wisata, para pengelola kawasan wisata, dan unsur pemerintah daerah yang membidangi urusan pariwisata yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) di tingkat Provinsi, dan semua Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Total informan dalam studi ini adalah 94 orang dengan jumlah kawasan wisata yang menjadi lokus studi sebanyak 15 lokasi. Kelima belas lokasi tersebut adalah Pantai Pasir Padi, Pantai Matras, Pantai Temberan, Pantai Tikus Emas, Pantai Tapak Antu, Pantai Kebang Kemilau, Ekowisata Mangrove Munjang, Teluk Rubiah, Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Kerasak, Pantai Batu Perahu, Konservasi Geosite Tebat Rasau, Pantai Burong Mandi, dan Tanjung Kelayang. Adapun wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan pokok telah disusun terlebih dahulu. Validasi data dilakukan dengan mewawancarai kembali secara acak beberapa responden dari setiap lokasi survei melalui sambungan telepon. Wawancara ulang ini bersifat konfirmasi penegasan kembali atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan kepada enumerator sebagaimana tertulis dalam kuesioner. Selain itu wawancara ulang ini juga menjadi strategi pendalaman informasi dan data karena ada beberapa tambahan informasi dan pandangan yang justru berkembang yang mana saat survei dilakukan tidak tersampaikan oleh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ekonomi

Setidaknya ada dua penyebab mendasar mengapa pengembangan industri pariwisata di Bangka Belitung bergerak ke arah yang positif yang ditandai dengan mulai terjadinya pergeseran orientasi pekerjaan. Pertama adalah soal potensi ekonomi yang mengiringi perkembangan minat masyarakat luas pada dunia wisata. Terhadap hal ini, terjadi peningkatan salah satunya dari pengaruh Film Laskar Pelangi yang mempertontonkan keindahan pantai di provinsi kepulauan ini. Teknologi yang berkembang cepat juga telah mendorong distribusi informasi tentang potensi pariwisata yang berkembang di suatu kawasan. Kedua adalah mulai ditinggalkannya industri ekstraktif tambang timah di provinsi yang mendorong transformasi pekerjaan dari ketergantungan pada tambang menjadi lebih variatif.

Memang harus diakui bahwa perkembangan spot wisata di Bangka Belitung berkembang pesat. Setidaknya saat ini peneliti mencatat lebih kurang ada 100 spot wisata berbasis alam yang ada di daerah ini, baik yang lama maupun yang saat ini sedang viral dan mulai dikunjungi publik. Kondisi ini telah mendorong perubahan orientasi pekerjaan penduduk setempat yang semula tidak melirik sektor ekonomi pariwisata sebagai sumber pekerjaan, menjadi bergeser ke arah keseriusan untuk menekuni dunia wisata sebagai sektor ekonomi alternatif, bahkan sebagai sektor utama.

Penulis mewawancarai para pedagang yang terlibat dalam usaha bisnis di sekitar kawasan wisata yang ada di Bangka Belitung, secara umum alasan keterlibatan di sektor ini karena memang adanya peluang dan mimpi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih mudah. Sebagian besar pedagang yang berdagang di sekitar kawasan adalah penduduk setempat yang bekerja seiring dengan potensi wisata yang mulai digarap secara serius. Muhammad dan Irfandi adalah dua orang pedagang yang pindah dari nelayan menjadi pedagang kecil-kecilan di sekitar Kawasan Wisata Pantai Pasir Padi menuturkan bahwa alasan keamanan dan kemudahan sebagai alasan untuk menekuni profesi sebagai pedagang di kawasan wisata. Beberapa pedagang lain mengakui bahwa selain karena melesunya sektor ekonomi yang awalnya mereka geluti, pertimbangan peluang yang tersedia juga menjadi alasan perpindahan. Beberapa pedagang ada yang sebelumnya bekerja sebagai sopir angkot, buruh harian, atau pedagang di tempat lain, lalu memutuskan untuk pindah sebagai pedagang kecil seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata. Arpan, salah satu pedagang di Pantai Temberan, Kabupaten Bangka, mengatakan *“ku ne dulu betimah, tapi sudeh tu pindah karena pantai ini ramai”*. Berkembangnya sektor wisata telah mendorong peralihan pekerjaan dengan harapan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hal yang sama dituturkan oleh Darussalam, salah satu pedagang di Pantai Matras, Kabupaten Bangka *“ku nyube e bedagang, sebelum e buruh timah, karena ku ngeliet banyak yang bedagang disini”*.

Peluang pendapatan ekonomi yang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya adalah alasan mendasar bagi para warga sekitar untuk terlibat.

Artinya, sektor pengembangan pariwisata di suatu lokasi telah meningkatkan minat warga untuk terlibat dalam proses pengembangan tersebut dengan melihat sektor bisnis sebagai sarana untuk terlibat. Peluang dan potensi adalah dua hal yang tentu saja menjadi pertimbangan mendasar. Hal ini tentu saja terkait dengan hitung-hitungan secara ekonomis antara pekerjaan baru di sektor pariwisata dengan pekerjaan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan terhadap pedagang di kawasan wisata, beberapa alasan perpindahan pekerjaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 1. Alasan menekuni sektor pariwisata

Berdasarkan penelusuran peneliti di lapangan, memang nampak bahwa keterlibatan masyarakat lokal di sekitar kawasan secara umum adalah sebagai pedagang. Mimpi untuk mendapatkan penghasilan lebih baik mendorong para warga untuk beralih pekerjaan ke sektor ini.

Salah satu alasan mendasar mengapa profesi baru ini digeluti adalah sedikitnya modal yang dibutuhkan untuk berjualan. Disamping usaha yang dirintis adalah usaha kecil-kecilan, belum terfasilitasinya pedagang dengan baik oleh pengelola maupun oleh pemerintah menyebabkan usaha yang digeluti cenderung belum permanen. Secara umum biaya yang dibutuhkan cukup rendah, antara kisaran 3 sampai 4 juta rupiah yang digunakan untuk membeli bahan dagangan dan untuk menyiapkan bangunan semi permanen sebagai tempat mangkal. Menarik sebenarnya untuk mencermati bahwa pekerjaan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata masih belum stabil. Artinya, potensi pendapatan baru belum dipersiapkan secara serius. Jika melihat kondisi ini, tentu saja kaitannya adalah pada layanan atas dagangan yang diperjualbelikan.

Sugiarti, Mirah, dan kawan-kawan yang berdagang di Teluk Rubiah, Kabupaten Bangka Barat, dalam wawancara mengatakan bahwa modal lebih kurang 3 juta rupiah digunakan untuk mendirikan lapak dan membeli bahan dagangan.

Sepertinya fenomena ini hampir terjadi di banyak tempat dimana dagangan masih menempati lokasi yang semi permanen, bahkan sebagian diantaranya bergerak '*mobile*'. Meski demikian, pada beberapa kawasan sudah disediakan lapak khusus pedagang dengan sistem sewa, namun lebih banyak pedagang membangun lapak sendiri. Secara umum, pada kawasan-kawasan wisata baru yang dikembangkan oleh masyarakat atau aparat pemerintah desa, pola perdagangan masih bersifat insidental dan mengikuti arus kunjungan wisata.

Menariknya, para pedagang justru meyakini bahwa potensi ekonomi dari pekerjaan ini justru menjanjikan. Hampir semua informan yang diwawancarai menyatakan optimismenya terhadap perkembangan industri pariwisata. Herviana, Nina, dan kawan-kawan yang berdagang di kawasan Tebat Rasau, sebuah obyek wisata berbasis hutan mangrove di Kabupaten Belitung Timur, mengatakan bahwa mereka yakin dengan potensi ekonomi dari pariwisata yang digeluti dan menyatakan komitmen untuk tidak beralih pekerjaan. Yanti, Samisar, dan beberapa pedagang yang berjualan di Kawasan Pantai Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, juga menyatakan optimismenya, meski menurut mereka ketergantungan pada promosi kawasan wisata menjadi salah satu penentunya. Rusli dan teman-temannya yang berdagang di kawasan Pantai Tikus Emas, Kabupaten Bangka, juga menuturkan bahwa mereka meyakini potensi pendapatan dari mereka yang baru digeluti saat ini.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan para pengelola kawasan berbasis ekowisata di Bangka Belitung, secara umum pelibatan masyarakat menjadi salah satu sumber modal sosial untuk mengembangkan kawasan wisata. Masyarakat sekitar bahkan secara umum dilibatkan sejak proses inisiasi awal.

Prinsip voluntarisme adalah kekuatan awal yang menjadi modal dari dikembangkannya sebuah kawasan wisata, utamanya untuk kawasan wisata yang memang dikelola oleh warga atau komunitas setempat. Beberapa kawasan wisata yang dibangun berbasis komunitas akan sangat bergantung pada dukungan kelompok pemuda, begitu juga dengan pengelolaan yang dipegang oleh pemerintah daerah. Pernyataan ini didasarkan pada temuan observasi di obyek wisata, dimana hampir seluruh pengelola dan

operator kegiatan di suatu kawasan pariwisata didominasi oleh anak-anak muda. Beberapa obyek wisata alam justru secara murni diinisiasi pembentukan dan pengembangannya oleh anak-anak muda.

Adapun pada kawasan wisata yang dikelola oleh usaha pribadi, secara umum tetap melibatkan warga sekitar untuk menjadi bagian dari proses pengelolaan. Secara umum, pemberdayaan komunitas lokal sudah berusaha dijalankan karena seperti dikatakan oleh Butarbutar dan Soemarno (2012) dan Ngurah dan Utama (2018) bahwa akses yang luas pada pengembangan pariwisata bagi masyarakat akan menjadi modal sosial yang kuat (lihat juga Giriwati, et.al., 2019; Indika dan Vonika, 2016; Wahyuni, 2018; Latianingsih, et.al., 2019).

Nasidi, pengelola Geowisata Tebat Rasau, Kabupaten Belitung Timur, mengatakan bahwa setidaknya ada 18 orang yang terlibat dari awal dalam proses pengembangan kawasan Tebat Rasau. Sementara Ines Sumona, salah satu aparat pemerintah desa di Kawasan Pantai Burung Mandi Belitung Timur menuturkan bahwa yang terlibat sejak awal adalah para pemuda yang tergabung dalam karang taruna, warga, dan secara umum didampingi oleh pemerintah desa.

Di Kabupaten Bangka Selatan, pengelolaan Kawasan Pantai Tanjung Kerasak juga diinisiasi oleh warga secara bersama-sama. Demikian halnya kawasan Teluk Rubiah yang juga dikelola dengan prinsip bersama. Samsiar, salah satu pengelola kawasan wisata Tapak Antu Kabupaten Bangka Tengah juga menuturkan bahwa pemerintah desa bersama-sama dengan unsur pemuda terlibat dalam proses inisiasi awal dan pengembangannya. Berdasarkan temuan di atas, dapat dikemukakan bahwa sebenarnya pelibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan mendasar dalam pengembangan sebuah kawasan wisata, baik keterlibatan secara langsung sebagai pengelola maupun secara umum sebagai pedagang.

Ekspektasi para pelaku di kalangan akar rumput cukup tinggi untuk dapat semakin mengembangkan kawasan wisata mereka masing-masing. Anggi, salah satu pengelola di kawasan Pantai Matras, Kabupaten Bangka, berharap ke depan dapat menambah fasilitas saung dan penerangan yang memadai. Zai, salah satu pengelola Teluk Rubiah, Kabupaten Bangka Barat, mengatakan bahwa sebenarnya potensi

kawasan wisatanya sangat baik namun harus didukung oleh pemerintah daerah. Menurutnya, usulan selama ini cenderung belum direspon dengan baik oleh pemerintah daerah. Alex selaku salah satu pengelola Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan jumlah pengunjung adalah dengan meningkatkan even-even di bidang maritim. Adapun Jaka yang menjadi salah satu pengelola kawasan Batu Perahu, Kabupaten Bangka Selatan berharap ke depan akan mengembangkan bisnis kuliner di kawasan tersebut.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan para pengelola dan pedagang, terlihat bahwa ekspektasi warga untuk mendapatkan benefit ekonomi dari proses pengembangan sebuah kawasan wisata menjadi motivasi mendasar. Pengelola sendiri melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan. Jika demikian, pariwisata memang tidak berdiri sendiri sebagai proyek pengembangan wisata, namun mendorong benefit untuk kepentingan warga sekitar sekaligus memberikan optimisme ekonomis kepada warga sekitar.

Akan tetapi, mengacu pada informasi di atas, nampak terlihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata masih cukup rapuh. Belum stabilnya jumlah pengunjung serta komoditas dagangan yang masih cenderung sederhana menunjukkan bahwa sektor ekonomi ini belum tergarap secara maksimal.

Ekonomi Politik Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada dasarnya mengandaikan adanya dukungan dari struktur kekuasaan untuk mendorong percepatan capaian di bidang ekonomi. Mafruhah, et.al., (2018) mengatakan bahwa peran pemerintah memegang posisi penting dalam pengembangan ekowisata di suatu kawasan. Jika aktivitas ekonomi memandang segala sesuatu sebagai hal yang *given*, maka penulis berasumsi bahwa ekonomi politik sesungguhnya memainkan peran penting. Ekonomi politik berbeda dengan kajian ekonomi dimana aktivitas ekonomi akan sangat ditentukan oleh pengambilan keputusan-keputusan politik.

Menurut Yustika (2009), perbedaan paling mendasar antara ekonomi dan ekonomi

politik adalah pada cara pandangnya terhadap kekuasaan. Ekonomi politik memandang bahwa keputusan politiklah yang menentukan struktur ekonomi. Lane dan Ersson (1994) menganggap bahwa alat-alat produksi, modal, dan tenaga kerja ditentukan oleh keputusan politik. Dengan demikian, menjadi penting untuk melihat bagaimana keputusan-keputusan politik dalam pengembangan pariwisata berjalan dan sejauhmana sebenarnya komitmen pemerintah atau pengambil keputusan dalam proses tersebut.

Penelusuran atas bagaimana pemerintah daerah mengambil sikap dan keputusan politik berkenaan dengan pengembangan pariwisata perlu ditilik secara mendalam. Studi ini mewawancarai para pengambil keputusan yang terdiri atas Dinas Pariwisata kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perangkat pemerintahan di tingkatan desa/kelurahan dimana spot wisata dikembangkan.

Studi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dirasakan belum terlalu berpihak pada kepentingan pengembangan pariwisata. Setidaknya hal ini dilihat dari beberapa hal.

Hery, salah satu pemilik kawasan wisata baru di Pangkal Pinang menuturkan bahwa dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pendanaan belum dirasakan. Anggi dan Aceng, dua orang pengelola kawasan wisata yang ada di Kabupaten Bangka juga menuturkan bahwa pembangunan fasilitas publik yang anggarannya bersumber dari pemerintah daerah nyaris bisa dikatakan tidak bisa dirasakan. Seperti dituturkan Anggi "*Di Pantai Matras ne memang ade jalan, cuma tu kan jalan umum, jadi wajar men dibangun e*". Aceng yang mengelola Pantai Temberan juga mengatakan bahwa tidak ada dukungan pendanaan dari pemerintah daerah sampai saat ini.

Cerita sedikit berbeda dituturkan oleh Samsiar, pengelola kawasan wisata Tapak Antu Bangka Tengah, yang mengatakan bahwa kawasan wisata di spot Tapak Antu sudah disiapkan dengan memadai, namun berbeda halnya dengan dukungan sarana prasarana di Pantai Kebang Kemilau yang menurut penuturan Rudy hanya berupa fasilitas lahan. Sementara di Pulau Belitung, dukungan pemerintah daerah dirasakan cukup baik, baik dukungan sarana berupa akses jalan yang dibangun memadai,

maupun dukungan dalam bentuk pelatihan-pelatihan meski dipandang belum terlalu merata.

Sementara itu, berbicara pada soal dukungan pendanaan, antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah cenderung berbeda. Salah satu Birokrat yang membidangi pariwisata di Kabupaten Bangka mengatakan bahwa sepanjang lahan yang dikelola tidak bermasalah, maka akan diberikan dukungan pembangunan sarana dan prasarana, seperti mushola, kios-kios, dan fasilitas lainnya. Adapun pemerintah daerah di Bangka Selatan memberikan dukungan dalam bentuk pembangunan sarana toilet, gazebo, dan mushola yang bersumber dari APBD. Meski demikian, dukungan pemerintah daerah belum merata untuk kawasan wisata yang saat ini berkembang. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan segmentasi untuk memberikan dukungan pendanaan dari anggaran pemerintah daerah. Sementara di Bangka Barat, dukungan yang diberikan masih terbatas, bahkan cenderung tercampur dengan fasilitas umum untuk kepentingan lainnya.

Adapun Zulfan, salah satu staf yang membidangi pengembangan pariwisata di Bangka Tengah menuturkan bahwa dukungan fasilitas memang berdasarkan skala prioritas dan dilakukan secara bertahap. Dukungan diberikan kepada kawasan wisata yang dianggap serius dalam pengelolaan. Adapun pengelolaan di kawasan wisata Kabupaten Belitung dan Belitung Timur secara umum dilakukan melalui penguatan aspek amenitas untuk mendukung kenyamanan pengunjung, namun status lahan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memberikan bantuan pendanaan atau pembangunan fisik.

Berkenaan dengan dukungan perijinan, perlakuan antara pemerintah daerah sendiri berbeda-beda. Di Bangka Selatan, perijinan lebih banyak diberikan dalam bentuk pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sementara di Bangka Barat, beberapa kawasan wisata bahkan tidak berada di bawah naungan Pemerintah daerah meski merupakan salah satu destinasi wisata, misalnya Teluk Rubiah dan Kawasan Pantai Tanjung Kalian. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kabupaten Bangka. Menurut IS, salah satu staf yang membidangi masalah pengembangan pariwisata bahwa perijinan umumnya dalam bentuk rekomendasi pembukaan lokasi dan

pembentukan Pokdarwis. Di Kabupaten Bangka Tengah, Zulfan, mengatakan bahwa umumnya perijinan dalam bentuk pembentukan Pokdarwis. Uniknya, di Belitung terdapat kawasan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati, sementara di Belitung Timur dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Meski demikian, komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata dituangkan dalam bentuk yang hampir sama, yakni dukungan dalam bentuk penguatan kapasitas SDM. Secara umum, hampir semua Dinas Pariwisata di setiap kabupaten/kota melakukan kegiatan pengembangan kapasitas. Bahkan Dinas setempat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Sumber dana penguatan kapasitas ini hampir seluruhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus Kepariwisataan yang besarnya berbeda-beda antar tiap Kabupaten/Kota. Peruntukan dana tersebut umumnya dialokasikan pada kegiatan pembekalan dan pendampingan bagi para pengelola wisata, baik destinasi, maupun aktivitas pendukungnya seperti *home stay*, pusat oleh-oleh, dan sebagainya.

Di Belitung Timur, anggaran penguatan kapasitas sumber daya manusia misalnya dilakukan dalam bentuk pelatihan pengelolaan *home stay*, pelatihan penyusunan paket wisata, pembinaan untuk asosiasi, dan lain sebagainya. Di Kabupaten Bangka Tengah, dinas terkait membelanjakan anggaran cukup besar untuk berbagai macam pelatihan, misalnya pelatihan pemandu wisata, pelatihan tata kelola destinasi,

dan peningkatan SDM lainnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat.

Jika digambarkan, maka berikut nilai atas kerangka kebijakan pengembangan pariwisata yang dikonfirmasi oleh studi ini :



Gambar 2. Model Intervensi Pemerintah Daerah

Dari gambaran data wawancara persepsi pelaku pariwisata di atas, dapat dikatakan bahwa menurut para target penerima fasilitasi dari sisi dukungan sarana dan prasarana, intervensi pemerintah masih relatif terbatas. Di samping terkait persoalan pemerataan dan irisan kepentingan dengan pembangunan kepentingan atau sarana umum lainnya, penilaian negatif lain adalah terkait besaran dukungan anggaran yang belum maksimal terutama untuk pembangunan sarana pendukung dan penunjang kawasan pariwisata yang lebih layak. Penyebab utamanya kita sadari adalah bahwa investasi yang diperlukan untuk membangun kawasan pariwisata yang umumnya berada di kawasan terpencil dengan karakteristik menyebar dan

Tabel 2. Persepsi Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah

Kab./Kota	Modal	Fasilitas	Pelatihan/Softskill	Perijinan	Perspektif Pemda
P. Pinang	Tidak ada	Kurang	Ada, variatif	Pokdarwis, SIUP	Bantuan meningkat
Bangka	Tidak ada	Sangat sedikit	Ada, variatif	pembukaan lokasi pembentukan pokdarwis	Bantuan sarana prasarana lancar jika lahan clear
Bangka Tengah	Tidak ada	Sebagian	Pemandu wisata, tata kelola destinasi	Pembentukan Pokdarwis	Berdasarkan skala prioritas dan bertahap
Bangka Selatan	Tidak ada	Minim	Ada, variatif	Dominan kepada Pokdarwis	Pembangunan sarana dengan segmentasi
Bangka Barat	Tidak ada	Minim	Ada, variatif	Banyak milik swasta/pribadi	Masih terbatas, irisan kepentingan umum lain
Belitung	Tidak ada	Sangat baik	Sangat baik, hanya belum merata	Peraturan Bupati	Sarana pendukung amenitas
Belitung Timur	Tidak ada	Meningkat	Homestay, paket wisata, asosisasi	Tanda Daftar Pelaku Pariwisata	Pendukung amenitas, asal status lahan jelas

Sumber: Data Primer Wawancara (2020)

luas sangatlah besar. Daya dukung anggaran daerah tentu tak mampu menangani persoalan ini. Kebijakan khusus seperti penetapan KEK dan investasi swasta adalah alternatif utama bagi pembangunan kawasan pariwisata secara masif dan komprehensif. Zona masih merah untuk dukungan sarana dan prasarana.

Sementara dari sisi dukungan perijinan, cara setiap pemerintah daerah memperlakukannya secara berbeda, mulai dari sebatas pembentukan Pokdarwis, sampai pada diterbitkannya Peraturan Bupati. Tidak terkelolanya dengan baik persoalan perijinan akan berimplikasi pada status kawasan wisata yang cenderung sulit diteruskan ke pengembangan yang lebih luas mengingat status kawasan dan perijinannya menjadi langkah awal untuk pengelolaan yang lebih kuat. Pada aspek ini, penulis menganggap bahwa zona kuning masih menjadi corak. Sementara dari sisi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, semua pemerintah daerah secara umum sudah memainkan peran yang cukup baik sehingga penulis menanggapnya sudah pada zona hijau yang artinya sudah diambil kebijakan yang positif dan berpihak pada pengembangan pariwisata.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya pengembangan pariwisata belum terlalu didesain secara maksimal sebagai salah satu sumber ekonomi alternatif. Berdasarkan tiga aspek utama yang diamati, yakni dukungan sarana dan prasarana, dukungan perijinan, dan dukungan pengembangan kapasitas, hanya aspek pengembangan kapasitas yang sudah berjalan secara optimal, sementara pada aspek dukungan sarana dan prasarana beserta perijinan belum optimal dilaksanakan.

Jika di bawah terjadi inisiatif yang kuat terhadap pengembangan kawasan wisata, baik yang sudah ada maupun yang baru dikembangkan, namun pada level atas belum terjadi perimbangan dalam konteks intervensi dari sisi pengambilan keputusan politik. Temuan dalam penelitian ini mengkonfirmasi bahwa aspek ekonomi politik dalam pengembangan pariwisata di Bangka Belitung masih bertumpu pada inisiatif komunitas, sementara dari sisi politis belum berjalan maksimal. Padahal, Nugroho, et.al. (2018) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya akan bersifat *multiplier effect*.

Menarik mencermati temuan Ibrahim, dkk (2019c) yang menulis bahwa dari sisi konseptual keinginan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor ekonomi alternatif di masa depan pengganti timah sudah kuat dan cenderung menjadi kampanye politis, namun faktanya pemerintah daerah belum secara optimal menganggap pengembangan pariwisata sebagai sesuatu yang penting. Temuannya terkonfirmasi bahwa Bupati dan Walikota di Bangka Belitung belum secara khusus memasukkan isu pariwisata dalam usungan visi dan misi masing-masing kepala daerah. Secara umum, para kepala daerah masih menempatkan isu pengembangan pariwisata sebagai isu yang tidak penting, meski kenyataannya cukup banyak dari mereka yang menempatkan sektor wisata sebagai komoditas politik.

Studi ini juga mengkonfirmasi temuan Ibrahim, dkk (2019) bahwa dukungan penganggaran dalam bentuk program pembangunan daerah tidak banyak yang tertulis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Wawancara di lapangan menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana memang belum terlalu banyak dirasakan. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa dari aspek ekonomi politik, para unsur pemerintah daerah masih menyerahkan proses pengembangan pada inisiatif komunitas dan belum optimal menempatkannya sebagai kerangka kebijakan politis yang didukung kuat oleh intervensi anggaran dan keputusan-keputusan politis lainnya.

Secara konseptual, pemerintah daerah masih menempatkan aktivitas pengembangan pariwisata sebagai aktivitas yang berjalan apa adanya; aktivitas yang dipandang akan terbentuk dari bawah sesuai dengan inisiatif komunitas, sementara dukungan pemerintah daerah belum optimal. Jika demikian, aktivitas pariwisata masih ditempatkan sebagai aktivitas ekonomi yang kaidah-kaidah hukum pasarnya belum diintervensi secara politis.

SIMPULAN

Tulisan ini menyimpulkan bahwa sektor pariwisata dipandang sebuah sektor ekonomi alternatif yang menumbuhkan optimisme baru bagi masyarakat disekitar kawasan wisata. Banyak warga yang terlibat sebagai pedagang dan memutuskan untuk pindah pekerjaan dari sebelumnya yang tidak menganggap sektor

pariwisata memberikan peluang ekonomi yang baik, bergeser menekuni dunia pariwisata.

Namun jika ditilik dari sisi kebijakan, pemerintah daerah nampak belum terlalu optimal menempatkan sektor pariwisata secara politis. Dilihat dari tiga aspek, yakni dukungan sarana dan prasarana, dukungan perijinan, dan pengembangan pariwisata, pemerintah masih tidak optimal dari sisi dukungan sarana dan prasarana serta dukungan perijinan, namun sudah memberikan dukungan yang baik dari sisi pengembangan kapasitas masyarakat dan pengelola.

Studi ini menemukan bahwa aktivitas pariwisata masih dipandang sebagai sektor ekonomi yang bergerak dari bawah ke atas, sementara intervensi pemerintah relatif belum optimal. Padahal dalam perspektif ekonomi politik, ekonomi sesungguhnya ditentukan oleh struktur kebijakan pemerintah yang ditentukan dari keputusan-keputusan politik yang diambil.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN yang telah mendanai kegiatan penelitian ini dalam skema Penelitian Dasar tahun 2019-2021 dengan nomor kontrak 164/SP2H/LT/DRPM/2019, dengan amandemen nomor: 164/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2020). *Sinergi, Transformasi, dan Inovasi, Menuju Indonesia Maju, Laporan Perekonomian Indonesia 2019*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2019.aspx
- Butar-Butar, R. R., and Soemarno. (2012). Community Empowerment Effort in Sustainable Ecotourism Management in North Sulawesi, Indonesia, *J-PAL*, 3 (1), 1-7. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/120>
- Djuyandi, Y. (2020). Sikap Politik Pemerintah Desa Jatimukti Dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Desa. *Jurnal Transformative*, 6(1), 28-47. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.2>
- Erman, E. (2010). Actor, Acces, and Environmental Politic in Bangka Tin Mining. *Journal of Indonesian Society*, 26 (2), 71-101. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmi.v36i2.640>
- Giriwati, N.S.U., Hawa, L.C., Pamungkas, S.T., Iyati, W., and Hidayat, A.R.T. (2019). Local Community Participation in Ecotourism Development : The Case of Sumberwangi Hamlet Destination, East Java, Indonesia. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 5 (1), 81-98. DOI: <https://dx.doi.org/10.20319/pijss.2019.51.8198>
- Haryadi, D. (2015). Cryminogen Factor of Illegal Mining in Bangka Belitung. *Jurnal of Law Problems*, 44 (1), 52-58. DOI: 10.14710/mmh.44.1.2015.52-58
- Ibrahim. (2016). Bangka Tin, and the Collapse of the State Power. *GTSF Journal of Law and Social Sciences (JLSS)*, 5 (1), 1-7. <http://dl6.globalstf.org/index.php/jlss/article/view/1703/1738>
- Ibrahim, I., Haryadi, D., and Wahyudin, N. (2018). From charm to sorrow: the dark portrait of tin mining in Bangka Belitung, Indonesia. *International Journal of Social Sciences*, 4 (1), 360-382. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.41.360382>
- Ibrahim, I., Zukhri, N., and Rendy, R. (2019a). Between Natural Tourism, the Booming of Laskar Pelangi Film, and the Image of Environmental Damage: Measuring the Perception of Regional Tourist on Bangka Belitung Tourism. *Journal of Physics: Conference Series* 1351, 012107, 1-9. Doi: 10.1088/1742-6596/1351/1/012107
- Ibrahim, I., Zukhri, N., and Rendy, R. (2019b). From Nature Tourism to Ecotourism: Assessing the Ecotourism Principles Fulfillment of Tourism Natural Areas in Bangka Belitung. *Society*. 7(2), 281-302. <https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/view/111>
- Ibrahim, I., Zukhri, N., and Rendy, R. (2019c). Between Tourism and Ecology: Review of Political Policy Commitments on Ecotourism Development in Bangka Belitung. *E3S Web of Conferences*, 118, 04008, 1-4. DOI: 10.1051/e3sconf/201911804008
- Indika, D.R., and Vonika, N. (2016). Rural Tourism Development Using Ecotourism

- as a Model of Community Empowerment in Cireundeu Indigenous Village, Cimahi, West Java, Indonesia. *International Conference of Integrated Microfinance Management (IMM-16)*, Atlantis Press, 0148-0154. DOI : <https://doi.org/10.2991/imm-16.2016.23>
- Junaedi, I.W.R. (2014). *Transformasi Ekonomi Komunitas Blimbingsari*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Lane, J. E., and Ersson, S. (1994). *Ekonomi Politik Komparatif*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Latianingsih, N., Mariam, I., and Susyanti, D.W. (2019). Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Homestay di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Law and Justice Journal*, 4(1), 35-38.
- Mafruhah, I., Mulyani, N.S., Istiqomah, N., and Ismoyowati, D. (2018). *Development of ecotourism based on Community Empowerment (A Case Study of Kebumen Regency)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 19 (2), 2018, pp. 196-206. DOI: <https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.6996>
- Ngurah, I.D.G., and Utama, M.S. (2018). Peran Modal Sosial, Potensi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat pada Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Lebih. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 7(6), 1647-1666. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/39051/24442>
- Nugroho, I., Negara, P.N., and Yuniar, H.R., (2018). The Planning and The Development of The Ecotourism and Tourism Village in Indonesia : A Policy Review. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 43-51. DOI: 10.31328/jsed.v1i1.532
- Pitana, I.G., and Putu, G.G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratama, S. (2016). The Political Economy Dimension Towards Conflict of Mining Governance (Case Study: Bangka Belitung Governoor's Regulation About The Moratorium of PT. Timah, Tbk Offshore Tin Mining. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 40-53, DOI : <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16084>
- Simamora, R.K., and Sinaga, R.S. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 4(1) 79-96.
- Sujitno, S. (2015). *The Impact of Indonesia's Tin Presence Throughout History*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- Sulista, S., Ibrahim, I., and Pratama, S. (2019). Accomodation, Resistance, and Divided Community : Study of The Dynamics of Offshore Tin Mining Conflict Between The Fishermen of The Coastal Area and Compaies in Bangka Island. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 275-296. DOI- <https://dx.doi.org/10.20319/pjss.2019.53.275296>
- Susilo, J., and Maemunah, S. (2009). *Three Centuries of Serving The World: Tin Mining Portrait in Bangka Belitung*. Jakarta: Mining Advocation Networking (JATAM).
- Wahyudin, N., Pratama, S., and Akbar, M. F. (2019). Market Potential Exploration of Tourism Sector and Local Tourists' Perception. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(3), 289-296. DOI: <http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v3i3.214>
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglangeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9 (1), pp. 83-100. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i1.994>
- Wardhani, R.S., and Valeriani, D. (2016). Green Tourism dalam Pengembangan Pariwisata Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Eonomi Global Masa Kini*, 7(1) 24-29. <http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1608>
- Yustika, A. E. (2009). *Ekonomi Politik, Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dari Ekonomi ke Ekonomi Politik

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%

★ searchworks.stanford.edu

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On